

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kampung Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak

Eka¹, Widia Astuti², Aguswan³, Abdul Mirad⁴, Vinanti Dwi Purnama⁵

¹²³⁴⁵Universitas Lancang Kuning

Email: eka1983@unilak.ac.id (email penulis utama/korespondensi)

Kata kunci

Penyusunan
 Perencanaan
 Pembangunan

Abstrak

Penyusunan Perencanaan Pembangunan ini sangat penting untuk di laksanakan oleh Kepala Desa dan Perangkatnya. Tujuan dari perencanaan desa yang tersusun agar pembangunan kampung dapat berjalan dengan baik. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kampung tidak bisa dilaksanakan dengan baik tanpa adanya data dan informasi lengkap dan akurat baik dalam Profil Desa, Organisasi Dan Tatalaksana Pemerintahan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Keuangan desa Dan Informasi Terkait Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian data kualitatif dan analisis deskriptif. Adapun teori yang digunakan penulis yaitu Teori Nurcholis (Aguswan 2018:13) meliputi Profil Desa, Organisasi Dan Tatalaksana Pemerintahan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Keuangan Dan Informasi Terkait tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat. Hasil penelitian ini adalah penyusunan perencanaan pembangunan ini masih belum optimal, hal ini terlihat dalam data dan informasi pada kampung jambai makmur masih belum optimal seperti masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan Musrenbang, dan masih kurang lengkapnya profil desa.

Keywords

Preparation Of
 Development
 Planning.

Abstract

Village development planning is very important to be carried out by the village head and his apparatus. The purpose of structured village planning is so that village development can run well without complete and accurate data and information both in village profiles, village administration and organization, village government administration, finance and related information about village governance and empowerment. This type of research uses qualitative data research and descriptive analysis. The theory used by the author is the theory of Nurcholis (Aguswan, 2018:13) which includes village profiles, village administration and organization, implementation of village development, village finances and other related information related to village governance and community empowerment. The results of this

study are that the preparation of this development plan is still not optimal, this can be seen in the data dan information in the jambai prosperous village which is still not optimal, such as the lack of community participation in participating in musrenbang activities, and the incomplete village profile.

Pendahuluan

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Penyusunan perencanaan pembangunan desa harus berdasarkan data dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan. Artinya adalah rencana pembangunan desa itu harus disusun berdasarkan kenyataan yang ada didesa, baik itu berupa masalah maupun potensi desa yang dimiliki desa. Dengan demikian, perencanaan pembangunan desa yang tersusun dapat sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Tujuan dari dilaksanakan penyusunan rencana pembangunan desa adalah terpenuhinya kebutuhan layanan public di tingkat desa, baik dalam pelayanan administrasi, pelayanan pembangunan dan pemberdayaan pada masyarakat desa. Penyusun rencana pembangunan desa memerlukan kerjasama yang baik antara pemerintahan desa lembaga-lembaga yang ada ditingkat desa,serta adanya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan desa yang diinginkan.

Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang di danai oleh anggaran pendapatan dan belanja desa, swadaya masyarakat desa dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Tugas pemerintah kampung dalam menyusun perencanaan pembangunan kampung adalah melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan kampung dengan melibatkan masyarakat kampung secara benar.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kampung Jambai Makmur salah satunya masih kurangnya partisipasi antara pemerintah kampung dengan masyarakat. Dapat dilihat dari jumlah utusan pada tahun 2018-2020 berjumlah 50 orang, namun yang hadir pada tahun 2018 berjumlah 40 orang, pada tahun 2019 berjumlah 24, dan pada tahun 2020 berjumlah 17 orang, jadi dapat disimpulkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti penyelenggaraan Musyawarah penyusunan perencanaan pembangunan Kampung pada tahunnya mengalami penurunan.

Adapun Tujuan dari dilaksanakan penyusunan rencana pembangunan kampung adalah terpenuhinya kebutuhan layanan public ditingkat desa, baik dalam pelayanan administrasi, pelayanan pembangunan, dan pemberdayaan pada masyarakat desa. Dalam penyusunan ini memerlukan kerjasama yang baik antara pemerintah desa lembaga lembaga yang ada serta adanya dukungan atau partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan desa yang diinginkan.

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan kampung juga harus dilengkapi dengan tersedianya data dan informasi yang lengkap dan akurat, data tersebut yaitu berupa Profil Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Organisasi dan Tata laksana pemerintahan desa, Keuangan desa, dan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini nantinya dapat memudahkan pegawai kampung atau perencana desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa dan menetapkan prioritas pembangunan desa yang diusulkan untuk program pembangunan yang diinginkan.

Dalam penelitian ini penulis juga menemukan fenomena dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa yang masih belum optimal. Terlihat dalam data dan informasi tersebut pertama masih kurang lengkapnya profil desa, dan organisasi serta tata laksana pemerintah desa yang masih kurang aktif dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, seperti organisasi pendidikan keterampilan keluarga (PKK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Kepemudaan, organisasi tersebut bisa membantu dalam mendukung rencana dan program pembangunan serta memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu kegiatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa peran dan fungsi pemerintah desa belum efektif dan kurang mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya belum dapat dijalankan oleh aparatur dikarenakan pendidikan aparatur desa sebagian besar pendidikan SMA.

Berdasarkan fenomena diatas penelitian ini dilakukan karena ingin mengetahui Bagaimana Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kampung, dan apa saja hambatan dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kampung Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis Penyusunan Perencanaan Pembangunan, dan apa saja hambatannya didalam penyusunan perencanaan pembangunan pada Kampung Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan acuan penelitian yang sudah ada sebelumnya yang mana penelitian-penelitian terdahulu mempunyai ruang lingkup dan pembahasan yang sama dengan penelitian penulis. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam melaksanakan penelitian ini di antaranya sebagai berikut :

Dalam penelitian ini yang berjudul " Analisis Perencanaan Pembangunan Di Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun" oleh Akhmarudin. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, Objek Pengkajiannya tentang perencanaan pembangunan. Adapun fenomena yang terjadi dalam penelitian ini adalah dana yang tidak sesuai dengan pembangunan, kurangnya informasi terkait dana yang masuk dan keluar untuk perencanaan pembangunan, dan pembangunan yang tidak tepat sasaran. Dalam penelitian, peneliti menggunakan Undang-undang No. 66 tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa yaitu partisipatif, berpihak pada masyarakat, terbuka, cermat, dan efisien dan efektif.

Selanjutnya dalam penelitian yang berjudul "Koordinasi Kelembagaan Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan di Desa Margaluyu Kecamatan Tenupalen Bandung Barat" oleh Yayat Rukayat dan Kawan-kawan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dimana penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Adapun fenomena yang terjadi dalam penelitian ini adalah perencanaan pembangunan desa belum mampu menjawab persoalan hidup masyarakat desa terkait sandang, pangan, dan papan, kesehatan, pendidikan, kecukupan air dan energi, penyusunan belum mengacu pada Peraturan Undang-undang yang ada. Dalam penelitian

ini peneliti menggunakan teori koordinasi oleh Stoner dan Wankel(2006) yaitu Komunikasi, Kerjasama, Sinkronisasi, dan Intergrasi atau Kesatuan

Dalam hal ini judul yang diteliti oleh penulis yaitu “Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kampung Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak”, adapun yang menjadi perbedaannya yaitu dari segi lokasi penelitian dimana lokasi penelitian si penulis berada di Kampung Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, serta suatu permasalahannya yang ada di penelitian terdahulu dengan yang diteliti si penulis jelas berbeda. Dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu juga memiliki persamaan yaitu sama sama membahas tentang perencanaan pembangunan, dari segi metode penelitiannya menggunakan metode deskriptif kualitatif

Metode

Penyusunan perencanaan pembangunan kampung jambai makmur kecamatan kandis kabupaten siak harus dilengkapi dengan tersedianya data dan informasi yang lengkap dan akurat. Hal ini nantinya dapat memudahkan petugas atau perencana desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa dan menetapkan prioritas pembangunan yang di usulkan untuk program pembangunan yang diinginkan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan, dan meringkas kondisi berupa hasil wawancara yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

Penyusunan perencanaan pembangunan kampung jambai makmur kecamatan kandis kabupaten siak ini menggunakan teori Nurcholis (Aguswan 2018:13) yang terdapat 5 aspek indikator yaitu :

- a. Profil desa
- b. Organisasi dan tata kelola pemerintahan desa
- c. Penyelenggaraan pemerintahan desa
- d. Keuangan desa
- e. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Dari 5 aspek indikator kegiatan penyusunan merupakan serangkaian untuk memperoleh data dan informasi yang nantinya akan di jadikan bahan untuk melakukan kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan desa. Ketersediaan data dan informasi ini dapat mendukung proses penyusunan perencanaan pembangunan pada kampung jambai makmur. Data dan informasi yang lengkap dan akurat dapat memberikan kemudahan bagi aparatur desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa yang di Musyawarahkan Pada Saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa)

Dari hasil penelitian kegiatan Musrenbang ini sudah dilaksanakan oleh kampung jambai makmur, namun partisipasi masyarakat yang masih kurang dalam mengikuti kegiatan Musrenbang padahal dalam penyusunan perencanaan ini memerlukan kerjasama yang baik antara pemerintah desa yang ada serta adanya dukungan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa yang diinginkan. Berdasarkan hasil penelitian tentang penyusunan perencanaan pembangunan kampung jambai makmur dapat dijelaskan sebagai berikut:

Profil desa

Profil desa merupakan gambaran umum desa yang menjelaskan kondisi desa secara keseluruhan. Di profil ini berisikan tentang data keluarga, potensi desa, dan data perkembangan desa. Keseluruhan data tersebut nantinya dapat dijadikan bahan dan masukan dalam musrenbang yang di lihat dari ketersediaan profil sebagai pendukung pembuatan penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Dari hasil penelitian dapat dijelaskan profil desa yang dijadikan data dan informasi penyusunan perencanaan pembangunan desa, proses penyusunan profil pada kampung jambai makmur sudah me dimana di Kampung Jambai Makmur belum menunjukkan keadaan profil desa karena karena profil desa/ kampung belum menggambarkan kondisi secara utuh dan lengkap karena ketersediaan data perkembangan desa belum tersusun, Sehingga perkembangan desa dari tahun tahun belum terlihat dengan baik. Padahal data perkembangan ini sangat digunakan nantinya untuk melihat kondisi riil desa secara nyata. Data perkembangan desa dan pembangunan desa harus tersedia, karena penyelenggara desa dan masyarakatnya dapat menindaklanjuti pembangunan yang belum direncanakan.

Dan salah satu kendala dalam proses penyusunan profil desa yaitu jaringan internet yang lambat dan kadang juga hilang timbul, hal ini juga berpengaruh dalam proses penginputan data ke dalam Prodeskel yang membutuhkan waktu yang lamaa. Dari hal diatas, bahwa profil desa yang menggambarkan keadaan umum desa di kategorikan belum lengkap artinya kebutuhan data dan informasi berupa profil belum dapat mendukung sempurnanya profil desa pada Kampung Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

Organisasi dan tata laksana pemerintahan desa

Organisasi dan tatalaksana desa merupakan kemampuan sumber daya organisasi dan sumber daya manusia (SDM) dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa yang efisien dan efektif. Data ini nantinya juga dapat dijadikan bahan dan informasi untuk memperkuat penyusunan perencanaan pembangunan desa kemudian dapat dijadikan masukan dalam kegiatan musyawarah rencana pembangunan desa. Ketersediaan data dan informasi organisasi dan tatalaksana desa mencakup pada aspek tatakelola manajemen desa sarana dan prasarana, SDM Aparatur.

Dari data diatas dapat dijelaskan data dan informasi organisasi tatalaksana yang ada di kampung jambai makmur ini juga memiliki jenis organisasi desa yang berada diluar struktur organisasi formal pemerintahan desa yaitu LPM (Lembaga Pengembangan Masyarakat), Ibu-ibu PKK, BUMDES, ada UED(Unit Ekonomi Desa), dan Remaja Mesjid. Keberadaan organisasi ini nantinya dapat membantu pemerintah desa dalam mendukung rencana dan program pembangunan serta dapat memenuhi pelayanan desa.

Berdasarkan pengamatan dan keterangan yang diperoleh penulis organisasi serta tatalaksana pemerintahan desa masih mencakup tatakelola manajemen desa seperti SDM Apartur, yang mana SDM Aparatur tersebut masih belum optimal dalam kerjasama antara pemerintah kampung, organisasi kampung, dan masyarakat dikarenakan masih ada yang belum paham dengan tugas dan tanggungjawabnya. sebagian besar organisasi di Kampung Jambai Makmur masih terdapat tingkat pendidikan yang tamatan SMA, Data dan informasi mengenai organisasi dan tatakelola pemerintahan desa nantinya dijadikan bahan dan masukan untuk mendukung dalam

penyusunan perencanaan pembangunan desa yang lengkap, serta dapat di jadikan sebagai acuan dalam kegiatan Musrenbang.

Penyelenggaraan pemerintahan desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah kegiatan organisasi pemerintahan desa dalam menyelenggarakan kegiatan bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang sosial, dan bidang pemberdayaan kepada masyarakat. Keseluruhan bidang-bidang tersebut menggambarkan tugas dan fungsi pemerintahan desa yang di selenggarakan oleh kepala desa dengan perangkatnya. Efektivitas penyelenggaraan pemerintah desa harus di dukung dengan tata usaha yang benar. Tata usaha adalah kegiatan catat mencatat semua proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang disebut dengan administrasi desa. Administrasi desa yang lengkap sangat penting bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil pengamatan diatas bahwa penyelenggaraan pemerintah desa pada kampung jambai makmur ini memiliki 4 bidang yaitu Bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, Bidang pelaksanaan pembangunan kampung, Bidang pembinaan kemasyarakatan kampung, dan Bidang pemberdayaan masyarakat kampung. Masing-masing setiap bidang ini meliki sub bidang dan kegiatan masing-masing.

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa ini juga dapat di dukung dengan tersusun rapinya administrasi yang ada di kampung, namun penulis menemukan bahwa dalam kegiatan administrasi yang ada di kampung jambai makmur masih belum lengkap dan belum terkelola dengan baik dikarenakan mereka sedang mengerjakan tugas lain, hal ini juga terkendala minimnya petugas staff bagian tata usaha. Dan dalam penyelenggaraan ini masyarakat juga dilibatkan namun partisipasi masyarakat di kampung ini masih sedikit.

Keuangan desa

Keuangan desa adalah segala sumber pendapatan desa yang dapat dikelola oleh pemerintahan desa dan dijadikan sumber daya kegiatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Sumber keuangan desa diperoleh dari pendapatan asli daerah (PAD), Alokasi Dana dan Desa (ADD), maupun bantuan dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia. Pemerintah desa wajib mengelolah keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan yang artinya terbuka; akuntabel artinya dipertanggung jawabkan; partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya.

Dari data diatas upaya dan usaha sudah dilakukan pemerintah kampung dengan membuat papan informasi berupa baliho dalam memberikan informasi baik secara lisan maupun tulisan terkait tentang anggaran, agar masyarakat bisa mengetahui anggaran kampung dan peruntukannya, Sehingga dengan adanya papan baliho, masyarakat diharapkan mengetahui, mengerti dan ikut mengawasi peruntukannya.

Berdasarkan pengamatan diatas bahwa pertanggungjawaban pemerintah kampung dalam pengelolaan keuangan desa dengan cara membuat surat pertanggung jawaban penggunaan anggaran desa pada pemerintah kampung jambai makmur kecamatan kandis kabupaten siak, telah dilaksanakan dengan baik oleh pengelola anggaran. Meskipun ada sedikit kendala di dalam menyusun SPJ nya. Mengelola anggaran sesuai dengan administrasi penyelenggaraan pemerintahan, dan aparatur yang mengelola telah memahami tata kelola keuangan yang perlu di pertanggungjawabkan, meskipun ada sedikit kendala dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban.

Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat.

Informasi pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat dapat dijadikan data pendukung dalam pembuatan penyusunan perencanaan pembangunan desa. Dengan tersedianya data dan informasi mengenai kegiatan pemerintahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat maka dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan segala bentuk layanan yang disediakan pemerintahan desa. Informasi yang disediakan bisa berupa media informasi yang disediakan baik secara lisan maupun tulisan (papan pengumuman) serta media online.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa Informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat desa harus disediakan penyelenggara, karena adanya berbagai macam informasi desa yang tersedia dapat memberikan bahan dan masukan dalam menyusun perencanaan pembangunan desa. Penyediaan informasi terkait penyelenggaraan dan pemberdayaan masyarakat masih secara manual menggunakan papan informasi berupa pengumuman, namun sedikit dari masyarakat yang mengetahui dan tertarik untuk membaca berita atau informasi terbaru yang diberikan pemerintahan desa. Jadi informasi dari desa nantinya di sampaikan juga melalui RT, meskipun begitu masyarakat sangat jarang mendapatkan pengumuman terbaru dari desa. Pentingnya ketersediaan media informasi tidak hanya untuk melakukan hubungan antara penyelenggara dengan masyarakat, akan tetapi yang lebih penting lagi kemudahan pihak desa dalam merancang pembangunan sesuai dengan data dan informasi yang lengkap, akurat, dan dapat di pertanggungjawabkan dalam memenuhi pelayanan publik.

Simpulan

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Penyusunan perencanaan pembangunan kampung harus dilengkapi dengan tersedianya data dan informasi yang lengkap dan akurat di jadikan bahan masukan dalam kegiatan Musrenbang. Data dan informasi penyusunan perencanaan pembangunan kampung mencakup tentang profil desa, organisasi dan tatakelola pemerintahan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, keuangan desa, dan informasi terkait tentang penyelenggaraan pemerintah desa dan pemberdayaan masyarakat.

Adapun faktor hambatan dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kampung Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak kegiatan musrenbang di kampung ini sudah dilakukan namun jumlah masyarakat yang diutus pemerintah kampung tidak sama dengan yg hadir dalam musrenbang dikarenakan jadwal kegiatan Musrenbang dilaksanakan ketika masyarakat masih sibuk bekerja. Belum optimalnya kerjasama antara pemerintah kampung, organisasi kampung, dan masyarakat karena dengan adanya kerja sama ini dapat memberikan masukan untuk mendukung penyusunan perencanaan pembangunan kampung. Belum rapi dan tertibnya data dari kegiatan catat mencatat semua proses penyelenggaraan pemerintah kampung, sehingga informasi penyelenggaraan pemerintahan kampung yang belum akurat administrasinya dalam penyusunan perencanaan pembangunan kampung Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

Referensi

- Afifudin. 2012. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Alfabeta. Bandung
- Aguswan. 2018. *Model Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa*. Surabaya. Jakad Media Publishing.
- Mahi, Ali Kabul dan Sri Indra Trigunarsi. 2017. *Perencanaan Pembangunan Daerah (Teori Dan Aplikasi)* Jakarta. Kencana
- Bihamding, Hariawan. 2019. *Perencanaan Pembangunan partisipatif Desa*. Jakarta: CV. Budi Utama.
- Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Volume 14, Nomor 1. 2021
- Jurnal Ilmu Adminstrasi Negara (JUAN) Volume 5, Nomor 2, November Tahun 2017)
- Meleong, Lexy. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta. Erlangga.
- Siagian, P. Sondang. 2012. *Administrasi pembangunan*. Jakarta:PT. Bumi Aksara
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Prihati, Sulaiman Zuhdi, Aguswan (2017). *Penyuluhan Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Di Desa Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar*. 1(1). 94-99
- Riant. Nugroho. 2011. *Manajemen Perencanaan Pembangunan*. Jakarta:Gramedia
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional.